



LAPORAN MONITORING (UJI PETIK) TRIWULAN KE-2 APRIL – JUNI 2019



OSP 4 – JAWA TIMUR

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	
A. PENDAHULUAN	2
B. REVIEW CAPAIAN	5
C. RENCANA TINDAK LANJUT	11
D. PENUTUP	11

A. PENDAHULUAN

Lokasi dampingan OSP 4 Jawa Timur tahun 2019 terdiri dari 18 Kota/Kabupaten, 759 Kelurahan/Desa namun dari jumlah tersebut terdapat 14 Kota/Kabupaten, 65 Kelurahan/Desa saja yang mendapatkan dana Stimulan BPM 2019. Tabel dibawah ini menjelaskan lokasi dan alokasi BPM di wilayah OSP 4, yaitu :

Tabel 1
Lokasi & Alokasi BPM dan PKM tahun 2019

NO	KOTA/KAB	JML KEC	Jml Kel (Kel)	JML Kelurahan BPM/PKM	Alokasi BPM 2019 (x Rp 1.000,-)	Alokasi PKM 2019 (x Rp 1.000,-)	Alokasi BPM + PKM 2019 per kluster (x Rp 1.000,-)
1	TRENGGALEK	1	13	1	1.500.000	10.000	1.510.000
2	TULUNGAGUNG	5	81	5	9.000.000	50.000	9.050.000
3	BLITAR	3	37	8	15.000.000	80.000	15.080.000
4	KOTA BLITAR	3	21	3	4.500.000	30.000	4.530.000
5	KOTA KEDIRI	3	46	1	500.000	10.000	510.000
6	KEDIRI	4	46	-	-	-	-
JUMLAH KLUSTER 1		19	244	18	30.500.000	180.000	30.680.000
7	MALANG	7	98	3	3.000.000	30.000	3.030.000
8	KOTA MALANG	5	57	10	14.500.000	100.000	14.600.000
9	KOTA BATU	3	24	-	-	-	-
JUMLAH KLUSTER 2		15	179	13	17.500.000	130.000	17.630.000
10	PROBOLINGGO	3	47	5	8.000.000	50.000	8.050.000
11	KOTA PROBOLINGGO	5	29	2	1.500.000	20.000	1.520.000
12	PASURUAN	5	91	2	1.500.000	20.000	1.520.000
13	KOTA PASURUAN	4	34	-	-	-	-
JUMLAH KLUSTER 3		17	201	9	11.000.000	90.000	11.090.000
14	LUMAJANG	1	12	1	1.000.000	10.000	1.010.000
15	JEMBER	5	37	2	3.500.000	20.000	3.520.000
16	BANYUWANGI	5	45	19	27.500.000	190.000	27.690.000
17	BONDOWOSO	1	11	3	3.000.000	30.000	3.030.000
18	SITUBONDO	4	30	-	-	-	-
JUMLAH KLUSTER 4		16	135	25	35.000.000	250.000	35.250.000
JUMLAH OSP 4		67	759	65	94.000.000	650.000	94.650.000

Periode pelaksanaan pendampingan dan pengendalian KOTAKU Tahun 2019 saat ini masuk pada tahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan, namun demikian pada kegiatan monitoring (uji petik) Triwulan 2 ini penekanannya lebih banyak pada siklus persiapan dan perencanaan kegiatan. Fokus uji petik saat ini adalah : 1). Kegiatan kelembagaan, 2). Akses Informasi dan akuntabilitas, 3). Kualitas dokumen perencanaan teknis, 4). Kualitas dokumen proses pencairan BPM 2019, 5). Kinerja pelaksanaan kolaborasi, 6). Efektifitas kerja KPP dan, 7). Kualitas data SIM persiapan dan perencanaan.

Kemajuan kegiatan KOTAKU sampai dengan bulan April 2019 sebagai acuan pelaksanaan uji petik adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Capaian Persiapan & Perencanaan Kegiatan

KEGIATAN	OSP 4	
	SELESAI	
	(kel.)	(persen)
A. PERSIAPAN DAN PERENCANAAN		73,27%
1. Konsep Desain Penataan Lingkungan Permukiman (Siteplan)	65	100,00%
2. Seleksi Kegiatan Prioritas	65	100,00%
3. Konsultasi dan sosialisasi dengan Pemda/Instansi Terkait dan Masyarakat	65	100,00%
4. Identifikasi Dampak dan rencana pengelolaan	65	100,00%
5. Pemaketan pekerjaan	65	100,00%
6. Pembentukan KSM/panitia	59	90,77%
7. Pembentukan/ Revitalisasi KPP	52	80,00%
8. Survei teknis/lokasi	65	100,00%
9. Survei harga satuan Upah/material/alat	65	100,00%
10. Kesepakatan harga dan Swadaya	65	100,00%
11. Penyusunan DED,RAB,RKS dan jadwal	51	78,46%
12. Verifikasi oleh Askot infra	27	41,54%
13. Penandatanganan SPK BKM dengan PPK	7	10,77%
14. Pemberkasan Pencairan Tahp 1	7	10,77%
15. Penyusunan Rencana Kerja KSM	20	30,77%
16. Verifikasi Rencana Kerja KSM oleh Faskel teknik dan UPL	19	29,23%
C. PENCAIRAN BPM TAHAP 1		5,38%
27. Pemberkasan Di Tingkat BKM	8	12,31%
28. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Korkot / Askot	6	9,23%
29. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat OC / OSP	6	9,23%
30. Verifikasi Dok Pemberkadan Ditingkat Satker	6	9,23%
31. Penerbitan SPM	1	1,54%
32. Entri Kedalam Aplikasi Emon	0	0,00%
33. Penerbitan SP2D	1	1,54%
34. Entri SP2D Kedalam Aplikasi SP2D Online	0	0,00%

Sumber : QS Android, 29 April 2019

Terdapat 73,27% kegiatan “selesai” pada tahap persiapan dan perencanaan atau sejumlah 27 Kelurahan/Desa dari 65 Kelurahan/Desa yang telah menyelesaikan penyusunan DED, RAB, RKS dan Jadwal. Terkait dengan hal diatas maka OSP dipandang perlu untuk melakukan monitoring (uji petik) guna memastikan kualitas dokumen perencanaan, dukungan kelembagaan dan transparansi serta akuntabilitasnya.

Berikutnya adalah hasil uji petik di lokasi sampling menjadi pembelajaran buat Kelurahan/Desa lainnya agar selama masa perencanaan dapat dikendalikan secara baik dan dipastikan kualitas dokumen perencanaan berkualitas.

A.1. Tujuan uji petik

Tujuan uji petik pada tahap persiapan dan perencanaan di Triwulan 2 ini adalah sebagai berikut :

- Memastikan kegiatan-kegiatan persiapan maupun readiness criteria pelaksanaan BPM 2019 telah dipenuhi;
- Memastikan kualitas dokumen perencanaan teknis yang telah disusun memenuhi standar teknis yg telah ditetapkan;
- Memberikan dukungan teknis untuk menyelesaikan permasalahan dan isu yang terjadi pada tahapan persiapan;
- Melakukan validasi data SIM untuk memperkuat system monev regular yang dilakukan melalui pemanfaatan SIM KOTAKU

A.2. Rekapitulasi Lokasi uji petik

Dengan mempertimbangkan progress dan kualitas pendampingan serta master uji petik yang telah dibuat oleh OSP 4 maka lokasi uji petik adalah sebagai berikut :

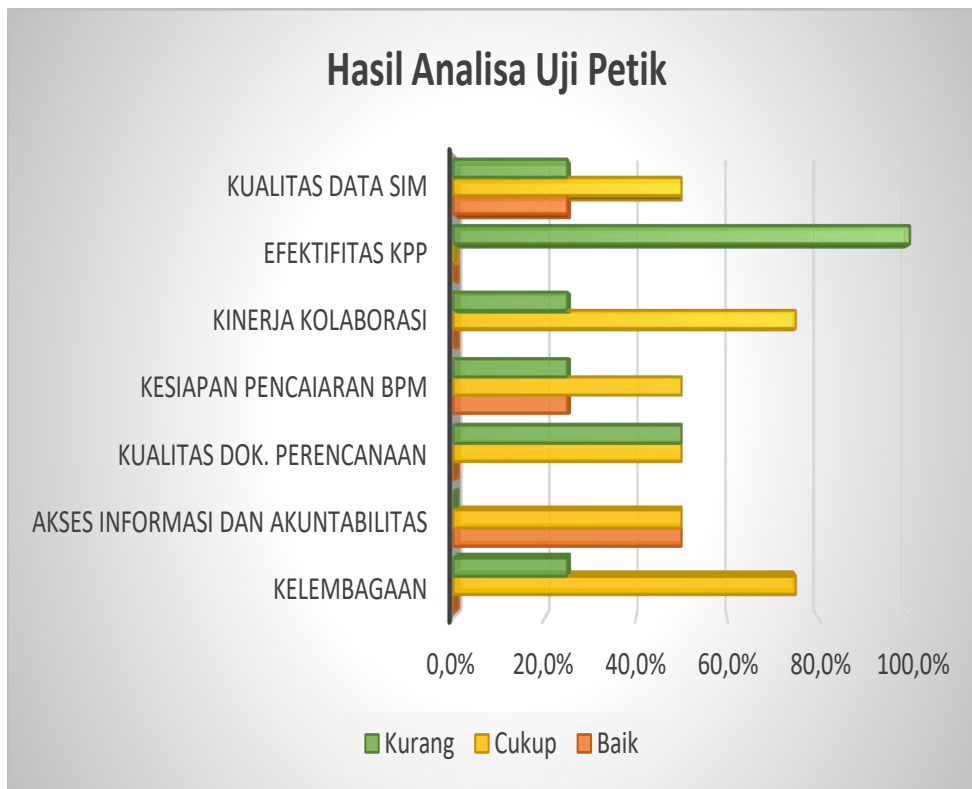
Tabel 3
Lokasi dan Personil pelaksana uji petik
Triwulan ke-2

No	Kota/Kabupaten	Kelurahan/ Desa	Tanggal	Personil yang ditugaskan	
				Nama	Jabatan
1	Tulungagung	Sobontoro Kutoanyar	17-19 Juni 2019	1. Zamroni 2. Achmad Fauzi	TA Infra TA Promon
2	Kota Malang	Mergosono Kiduldalem	20-21 Juni 2019	All Team	-
3	Kota Probolinggo	Sukabumi Wonoasih	17-19 Juni 2019	1. Zamroni 2. Edi Sutanto	TA Infra TA UP
4	Jember	Andongrejo Bintoro	24-26 Juni 2019	1. Edi Sutanto 2. Sri Suhartiningsih	TA UP TA FIC

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Secara umum hasil uji petik menggambarkan kondisi lapang yang baik (13,8%), Cukup 48,3% dan Kurang 34,5%. Namun jika dirinci per topic atau item uji petik ada perbedaan-perbedaan terhadap kondisi lapang yang disebabkan oleh berbagai faktor. Aspek Efektifitas KPP yang mendominasi kategori “kurang” dengan 100% kategori kurang dan aspek paling baik adalah akses informasi dan akuntabilitas yaitu sebesar 50% baik, hal yang paling dominan adalah penyelesaian PIM dan responsive BKM terhadap PIM,. Begitupun aspek kelembagaan dan kinerja kolaborasi dalam kategori cukup baik.

No	Aspek	Baik	Cukup	Kurang
1	Kelembagaan	0,0%	75,0%	25,0%
2	Akses Informasi dan Akuntabilitas	50,0%	50,0%	0,0%
3	Kualitas Dok. Perencanaan	0,0%	50,0%	50,0%
4	Kesiapan Pencairan BPM	25,0%	50,0%	25,0%
5	Kinerja Kolaborasi	0,0%	75,0%	25,0%
6	Efektifitas KPP	0,0%	0,0%	100,0%
7	Kualitas data SIM	25,0%	50,0%	25,0%
Jumlah OSP 4		13,8%	48,3%	34,5%



Dari 8 (delapan) Kelurahan/Desa yang menjadi sampling uji petik triwulan ke-2, melalui Tabel dibawah ini menggambarkan detail tentang capaian, isu, factor penyebab dan rekomendasi, Pengelompokannya mengacu pada instrument yang digunakan di 8 Kelurahan lokasi sampling. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Catatan dan Rekomendasi

No.	Topik	Capaian kuantitatif	Isu/catatan lapangan	Faktor penyebab	Rekomendasi
1.	Kegiatan Kelembagaan	75% cukup dan 25% kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Dari 10 item penilaian di kegiatan kelembagaan untuk LKM cukup baik karena kegiatan rutinitas BKM (pemilu, RWT) sudah dilaksanakan dan penilaian perkembangan Organisasi Mandiri, namun kelengkapan administrasi yg perlu adanya perbaikan dan penguatan terkait pentingnya administrasi (pengarsipan) • Penilaian kelembagaan yg secara administrasi mandiri tapi secara riil dilapang ditemukan tidak semua pengurus BKM memahami substansi kelembagaan LKM 	<ul style="list-style-type: none"> • LKM belum mencatatkan ulang AD/ART di Notaris karena kesibukan dan pemahaman. • Kesulitan (waktu dan kesadaran) dalam pembentukan forum kolaborasi • Belum dilaksanakan PKM 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan fasilitasi pencatatan AD/ART di notaris. • Terkait forum kolaborasi yg belum terbentuk disarankan tidak harus membentuk forum baru tapi yg ada saat ini seperti forum RW dan kelurahan/perangkat desa serta kelompok peduli lingkungan. • Terkait kegiatan PKM 2019 menunggu Revisi DIPA PKM

2.	Akses Informasi dan Akuntabilitas	50% Baik dan 50% cukup	<ul style="list-style-type: none"> • PIM masih langsung dicatat oleh faskel tanpa ada catatan dan registrasi di internal BKM • Kotak PIM blm dimaksimalkan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman BKM terkait pentingnya PIM rendah • Alur aduan belum dipahami oleh BKM dan Masyarakat. • BKM belum terbiasa setiap ada pertanyaan dari masyarakat terdokumentasi dengan dicatatnya dan diregistrasi sehingga setiap ada rapat rutin BKM atau rapat dengan faskel dan perangkat belum secara sistematis dibahas krn tidak tercatat dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan oleh Tim faskel kepada pengelola PIM dan BKM agar tau dan paham mekanisme kalau ada pengaduan dari masyarakat, perangkat kelurahan/desa sehingga PIM bisa dikelola/ terekam secara administrasi dengan baik • Pendamping memastikan seluruh aduan terinput di format aduan dan teregister di buku PIM baik aduan maupun penyelesaian.
3.	Kualitas dokumen perencanaan teknis	50% cukup dan 50% kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Pra desain sudah disusun namun perubahan wajah permukiman belum terlihat masih bersifat penyelesaian masalah; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pre desain belum dilakukan lokakarya dengan masyarakat dan pihak kelurahan • Mash belum dilakuakn Kesesuaian kebutuhan dengan kegiatan di RO 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemetaan dan verifikasi ulang tentang kriteria kualitas pre desain yang baik • Melakukan simulasi RO dengan kebutuhan di masyarajat.

			<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen perencanaan sudah cukup baik, namun perlu melengkapi sampai 22 format terisi lengkap dan benar. • Jumlah nilai pemaketan pekerjaan sudah sesuai dengan ketentuan POS Infra 2019. • Masih ditemuinya kesalahan dalam menentukan outcome kegiatan • Dokumen sudah tersedia namun dalam bentuk softcopy sehingga menyulitkan saat dilakukan pemeriksaan • Masih ditemuinya RAB yang belum dikonsultasikan dengan tim satker 	<ul style="list-style-type: none"> • Titik kegiatan belum disepakati dengan Pihak Kelurahan, sehingga potensi berubah masih besar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim fasilitator melakukan bimbingan dalam penyusunan proposal rencana kerja KSM/panitia pelaksana, sesuai ketentuan POS skala lingkungan 2019 • Korkot bersama askot berkonsultasi dengan tim Kota/Kabupaten khususnya tentang harga kab/kota
4.	Kualitas proses pencairan BPM 2019	25% baik, 50% cukup dan 25% kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi lapang menggambarkan masih terdapat delay antara pencairan ke BKM dengan pencairan ke KSM juga pelaksanaan pekerjaan fisik 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan dokumen teknis, diperlukan survey ulang • Kesiapan KSM, salah satunya pembukaan rekening 	Tim Korkot membuat schedule yang idela untuk pencairan dan pemanfaatan BPM serta melakukan akselerasi penyiapan KSM dengan pemberkasan

			<ul style="list-style-type: none"> •Dokumen pencairan lengkap •Tahapan pencairan sesuai dengan ketentuan yaitu 70% dan 30% 	<ul style="list-style-type: none"> • Proses lelang yang memerlukan waktu cukup 	
5.	Kinerja pelaksanaan kolaborasi	75% cukup dan 25% kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada pertemuan antar unsur lembaga dan masyarakat di desa • Data kegiatan kolaborasi sudah ada dan sesuai data SIM • Belum terbentuknya forum kolaborasi secara formal namun belum mempunyai rencana kerja • Data kegiatan kolaborasi masih perlu dilengkapi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman pendamping tentang Forum Kolaborasi kurang • Dukungan berbagai unsur masyarakat dan pemerintah untuk membentuk forum kolaborasi serta berperan dalam memasarkan perencanaan dan mengidentifikasi kegiatan yang berkontribusi menyelesaikan permasalahan permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> • Segera dibentuk Forum Kolaborasi dan ada jadwal rutin pertemuan • Mengidentifikasi kegiatan kolaborasi yang berdampak terhadap permasalahan permukiman
6.	Efektifitas kerja KPP	100% kurang	KPP berjalan hanya sebatas terbentuk saja tapi apa dan bagaimana jalannya kedepan belum paham dan tidak didukung rencana kerja yang jelas.	<ul style="list-style-type: none"> •Terbentuknya KPP hanya sebagai syarat saja •Belum ada peran pemda/keurahan dalam memastikan KPP berfungsi 	<ul style="list-style-type: none"> •Perlu ada penguatan secara efektif terkait tupoksi KPP yg aplikatif •Perlu adanya testimoni KPP yg berhasil sehingga ada motivasi

				<ul style="list-style-type: none"> • Serah terima belum dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan KPP terkait kelembagaannya baik dari system kerja dengan membuat rencana kerja dan memprediksi sumber - sumber pendanaan
7.	Kualitas data SIM tahap persiapan & perencanaan	25% baik, 50% cukup dan 25% kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Data Pimkol Tingkat Basis & Desa untuk telah terentry di SIM Off & On Line • Data dana PKM masuk rekening BKM sudah ada • Data Siklus RPLP sudah terentry di SIM Online • Data Investasi RPLP 5 tahun telah terentry dalam SIM Online • Data RPD BPM sudah ada di SIM Offline • Data RPD BPM belum dentry di SIM Online 	Ketaatan proses dan input sesuai prosedur belum menjadi acuan. khususnya terhadap alur dan mekanisme pemenuhan data kegiatan Program KOTAKU dan validasi data SIM Off/Online	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi yang intens dan delivery data secara berjenjang • Percepatan entry data SIM Off/OnLine di semua tingkatan pelaku

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana tindak lanjut merupakan kesepakatan yang dibangun melalui kegiatan wrapup meeting bersama seluruh Tim Korkot. Perkembangan tindak lanjut sampai dinyatakan “selesai” sesuai dateline yang disepakati akan dilaporkan secara khusus dan tidak masuk dalam badan laporan uji petik.

D. PENUTUP

Hasil-hasil dari uji petik diatas memberikan gambaran umum terhadap keseluruhan kualitas pelaksanaan kegiatan pendampingan OSP khususnya di Triwulan ke 2 tahun 2019 dan menjadi input untuk strategi dan pengendalian kedepan.

Laporan uji petik disampaikan kepada KMP program KOTAKU Wilayah-2 dan Manajemen Surveyor Indonesia kerjasama dengan PT Surya Abadi Konsultan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Probolinggo



Wrap up – Kota Malang



POKJA PKP - Tulungagung



Wrap – up - Tulungagung



Kidul Dalem - Kota Malang



Bintoro - Jember